



---

**KLIPING DIGITAL  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN**

**03 – 04 November 2022**

---





## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04 / 11 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	<b>TANGGAL</b> <b>MEDIA</b> <b>JUDUL</b> <b>NARASUMBER</b> <b>RESUME</b>	<p>Kamis, 3 November 2022</p> <p><a href="https://infopublik.id/kategori/nusantara/681657/gubernur-riau-syamsuar-resmi-buka-property-expo-2022#">https://infopublik.id/kategori/nusantara/681657/gubernur-riau-syamsuar-resmi-buka-property-expo-2022#</a></p> <p>Gubernur Riau Syamsuar Resmi Buka Property Expo 2022</p> <p>Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna.</p> <p>Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar resmi membuka kegiatan program Property Expo 2022 di Atrium Kampar Mall SKA Pekanbaru, Rabu (02/11/2022). Secara bersamaan, kegiatan ini juga dibuka oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna. Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, bahwa kebutuhan terhadap perumahan ini di Kota Pekanbaru terutama Provinsi Riau masih sangat tinggi. Sementara itu, Pemimpin Perusahaan Tribun Pekanbaru, Purnomo Kamid Rusla menyebutkan, kegiatan ini kolaborasi pertama dengan Himperra Riau.</p>	+
2	<b>TANGGAL</b> <b>MEDIA</b> <b>JUDUL</b> <b>NARASUMBER</b>	<p>Kamis, 3 November 2022</p> <p><a href="https://www.goriau.com/berita/baca/developer-diingatkan-bangun-rumah-layak-bukan-bermasalah.html">https://www.goriau.com/berita/baca/developer-diingatkan-bangun-rumah-layak-bukan-bermasalah.html</a></p> <p>Developer Diingatkan Bangun Rumah Layak, Bukan Bermasalah</p> <p>Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna</p>	+



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04 / 11 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

	<b>RESUME</b>	Para developer yang bergabung dalam Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) diingatkan agar membangun rumah yang layak huni untuk masyarakat, bukan yang menimbulkan masalah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna pada Property Expo 2022 di Atrium Kampar Mall SKA Pekanbaru, Riau. Pada kesempatan itu, Herry juga menghimbau seluruh pihak untuk dapat memperhatikan lebih khusus kelompok masyarakat informal. Pihaknya juga berharap, dengan terselenggaranya expo menjadi momentum yang tepat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai rumah layak huni, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah terhadap informasi harga, lokasi, dan persyaratan bantuan dan kemudahan pembiayaan rumah layak huni di Provinsi Riau. Selain itu, pihaknya juga menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki beberapa program subsidi. Pertama adalah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ada sebanyak 200 ribu unit yang dikembangkan menjadi 220 ribu unit. Kemudian, juga ada subsidi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang tidak berpenghasilan tetap ada juga Tabungan Perumahan Rakyat (Taperra).	
3	<b>TANGGAL</b> <b>MEDIA</b> <b>JUDUL</b> <b>NARASUMBER</b>	Kamis, 3 November 2022 <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20221103181137-4-384997/pendanaan-jadi-masalah-utama-pemenuhan-penyediaan-air-bersih">https://www.cnbcindonesia.com/news/20221103181137-4-384997/pendanaan-jadi-masalah-utama-pemenuhan-penyediaan-air-bersih</a> Pendanaan Jadi Masalah Utama Pemenuhan Penyediaan Air Bersih Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Kementerian PUPT Meike Kencanawulan Martawidjaja.	+



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04 / 11 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

	<b>RESUME</b>	Penyediaan air bersih yang layak untuk diminum masyarakat menjadi salah satu perhatian utama yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Sebab, ketersediaan air bersih tidak banyak atau terbatas. Sehingga perlu adanya sebuah kerja sama yang kuat antara pemerintah maupun swasta. Hal tersebut diakui oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Kementerian PUPT Meike Kencanawulan Martawidjaja. Menurutnya salah satu masalah utama pemerintah dalam penyediaan air minum yang layak kepada masyarakat adalah pendanaan untuk mengembangkan infrastruktur air. Kendati demikian ia menyebut perkembangan pembiayaan saat ini sudah lebih baik. Karena banyak skema yang bisa dilakukan pemerintah dalam mendorong program-program percepatan infrastruktur, di antaranya ada kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau (KPBU), kemudian ada juga business to business, terutama BUMD baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan badan usaha.	
4	<b>TANGGAL MEDIA  JUDUL  NARASUMBER</b>	Kamis, 3 November 2022 <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20221103181958-4-385000/integrasi-hulu-hilir-jadi-syarat-mutlak-bangun-akses-air">https://www.cnbcindonesia.com/news/20221103181958-4-385000/integrasi-hulu-hilir-jadi-syarat-mutlak-bangun-akses-air</a>  Integrasi Hulu Hilir Jadi Syarat Mutlak Bangun Akses Air  Direktur Utama PT Moya Indonesia Irwan Atmadja Dinata Direktur Utama PT Danareksa Arisudono Soerono	+



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04 / 11 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

	<b>RESUME</b>	Direktur Utama PT Moya Indonesia Irwan Atmadja Dinata mengungkapkan penyediaan air bersih menjadi tanggung semua stakeholder, terutama untuk perawatan air baku. Penyaluran air dari hulu ke hilir menurutnya pun masih menjadi pekerjaan rumah, dan diperlukan sinkronisasi aturan. Dia juga mengingatkan sistem yang dibangun pun harus terintegrasi dan tidak terpecah dengan rumit. Investasi SPAM akan sulit dan tidak menarik jika sistemnya rumit. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Danareksa Arisudono Soerono mengatakan pendanaan dan investasi harus diperhatikan dalam penyediaan air bersih ini. Dalam Indonesia Water Fund, Danareksa berperan menggalang dana dari investor dan menyalurkan dana kepada pengelola. Arisudono mengatakan Danareksa berkomitmen membantu pemerintah mencapai target 10 juta sambungan rumah di 2024. Tantangannya dalam pembangunan akses air bersih ini adalah sistem SPAM yang terfragmentasi sehingga adanya ketimpangan. Untuk itu, penting ada pembangunan terintegrasi dari hulu ke hilir atau <i>source to tap</i> .	
5	<b>TANGGAL</b> <b>MEDIA</b> <b>JUDUL</b> <b>NARASUMBER</b> <b>RESUME</b>	<p>Kamis, 3 November 2022</p> <p><a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20221103172923-4-384981/sederet-inovasi-ini-diperlukan-genjot-akses-air-bersih-di-ri">https://www.cnbcindonesia.com/news/20221103172923-4-384981/sederet-inovasi-ini-diperlukan-genjot-akses-air-bersih-di-ri</a></p> <p>Sederet Inovasi Ini Diperlukan Genjot Akses Air Bersih di RI</p> <p>Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Trisaputra Zuna</p> <p>Pemerintah sedang berupaya meningkatkan akses air bersih dengan investasi pembiayaan campuran (<i>blended financing</i>) sehingga bisa membangun akses dari sumber (<i>source</i>) sampai ke konsumen (<i>to tap</i>). Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Trisaputra Zuna mengatakan <i>source to tap</i> secara konsep telah dilakukan perencanaan dan pelaksanaannya. Dengan begitu, PDAM hanya membayar air yang diterima, sehingga lebih berkeadilan dan efisien, dan memberikan solusi kepada pemerintah daerah. Untuk menggaet pihak swasta pun dilakukan sosialisasi dan pendampingan di setiap daerah. Sebagai informasi, pemerintah menargetkan 10 juta sambungan rumah untuk penyediaan air bersih dengan kebutuhan investasi mencapai Rp 123 triliun.</p>	+



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04 / 11 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

6	<b>TANGGAL</b> <b>MEDIA</b> <b>JUDUL</b> <b>NARASUMBER</b> <b>RESUME</b>	<p>Kamis, 3 November 2022</p> <p><a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20221103152638-4-384934/akses-air-bersih-belum-100-ternyata-ini-kendalanya">https://www.cnbcindonesia.com/news/20221103152638-4-384934/akses-air-bersih-belum-100-ternyata-ini-kendalanya</a></p> <p>Akses Air Bersih Belum 100%, Ternyata Ini Kendalanya</p> <p>Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah</p> <p>Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah mengungkapkan akses air bersih di wilayahnya juga menjadi salah satu fokus utama karena masih belum mencapai 100%. Di Tangerang menurutnya masih ada yang mengandalkan air tanah dan membeli air secara curah. Kalau jumlah layanan 455 ribu kepala keluarga. Sekarang baru terlayani baru 34%. Ini akan kami kejar melalui program Kementerian PUPR, hingga pembiayaan. Dia mengatakan pemerintah akan melakukan integrasi sehingga bisa memperluas akses air bersih, dengan memanfaatkan Cisadane dan menarik perhatian investor. Langkah ini menurutnya penting dilakukan karena wilayah utara Tangerang sudah mulai payau. Salah satu kendala utama dalam perluasan akses air bersih menurutnya adalah pembiayaan. Pasalnya, wilayah dengan penduduk hampir 2 juta ini membutuhkan lebih banyak jaringan utilitas mulai dari sumber hingga sambungan rumah. Meski demikian dia optimistis bisa menarik investor karena adanya kepastian untung tanpa membebani masyarakat. Pasalnya, air sebagai kebutuhan utama dan memiliki demand yang tinggi.</p>	+
7	<b>TANGGAL</b> <b>MEDIA</b> <b>JUDUL</b> <b>NARASUMBER</b>	<p>Jumat, 04 November 2022</p> <p><a href="https://www.solopos.com/kementerian-pupr-revisi-aturan-harga-rumah-subsidi-1463468">https://www.solopos.com/kementerian-pupr-revisi-aturan-harga-rumah-subsidi-1463468</a></p> <p>Kementerian PUPR Revisi Aturan Harga Rumah Subsidi</p> <p>Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja</p>	+



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

---

04 / 11 / 2022

| Analisis Pemberitaan Media Online

---

<b>RESUME</b>	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merevisi Peraturan Menteri PUPR terkait penyesuaian harga rumah subsidi. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan untuk menyesuaikan harga rumah subsidi, pihaknya terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan untuk mengatasi kenaikan bahan konstruksi. Sebelumnya, pengembang rumah subsidi terus mendorong pemerintah untuk segera menyesuaikan harga terhadap kenaikan harga bahan material. Apalagi, harga rumah subsidi masih belum diubah hampir 3 tahun. Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengaku telah mengajukan anggaran untuk penyesuaian harga rumah subsidi dengan kenaikan sebesar 7%. Menurut Sekjen DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali kenaikan 7% semestinya tidak memberatkan konsumen, mengingat pendapatan UMR sudah meningkat sejak 3 tahun lalu.</p>
---------------	---





03 / 11 / 2022

Sumber: infopublik.id

---

## **Gubernur Riau Syamsuar Resmi Buka Property Expo 2022**

Redaktur: Kusnadi

**Pekanbaru, InfoPublik** - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar resmi membuka kegiatan program Property Expo 2022 di Atrium Kampar Mall SKA Pekanbaru, Rabu (02/11/2022).

Sacara bersamaan, kegiatan ini juga dibuka oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementrian PUPR Herry Trisaputra Zuna.

Property Expo 2022 ini dihelat oleh Tribun Pekanbaru dengan menggandeng DPD Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Provinsi Riau.

Kegiatan tersebut, dimulai dari tanggal 2 hingga 6 November 2022 mendatang dengan tema Menyatukan Langkah Menggapai Rumah Masa Depan.

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, bahwa kebutuhan terhadap perumahan ini di Kota Pekanbaru terutama Provinsi Riau masih sangat tinggi.

Sebab, masih banyak masyarakat miskin yang belum memiliki tempat tinggal yang layak dan asri.

"Kami senang sekali dengan adanya kegiatan Property Expo ini, juga sekaligus menjadi bagian promosi kita kepada masyarakat," kata Syamsuar.

"Tentunya, kita harap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan jumlah perumahan dan membantu masyarakat kita yang belum memiliki rumah," ujarnya.

Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, pihaknya menyambut baik juga memberikan penghargaan yang tinggi kepada DPD Himperra bersama Tribun Pekanbaru yang melakukan kegiatan Property Expo 2022.

"Beberapa hari yang lalu panitia bersama pimpinan tribun telah menghadap kami dan alhamdulillah hari ini sudah dapat dilaksanakan kegiatan ini," ucap Syamsuar.

"Semoga dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis terutama bisnisproperty yang ada di Provinsi Riau," harapnya.

Sementara itu, Pemimpin Perusahaan Tribun Pekanbaru, Purnomo Kamid Rusla menyebutkan, kegiatan ini kolaborasi pertama dengan Himperra Riau.

"Peserta kita jika dibandingkan dengan 2019 cukup meningkat yaitu 34 stand yang diikuti oleh 19 pengembang dan industri pendukung perumahan. Ini menunjukkan perekonomian masyarakat kita sudah mulai bangkit kembali semenjak Covid-19," sebut Purnomo.

Ia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan berkontribusi menyukseskan acara ini, harapan kami dengan terselenggaranya kegiatan ini akan mendorong dan meningkatkan perekonomian khususnya di perumahan yang ada di Provinsi Riau.

"Ini adalah kolaborasi pertama bagi kami dan kepercayaan kepada tribun untuk menggelar acara ini," imbuhnya.



## **KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

---

03 / 11 / 2022

Sumber: infopublik.id

---

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementrian PUPR Herry Trisaputra Zuna, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementrian PUPR Haryo Beki Marto, Ketua Bidang Peraturan dan Perundangan DPP Himperra Andi Anzar Cakra Wijaya.

Kemudian, Kepala OJK Provinsi Riau Muhammad Lutfhi, Kadis PUPR Muhammad Arief Setiawan, Kabid IKP Diskominfotik Riau Raja Hendra Saputra, Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Riau Robinson Sitorus, Kabag Dalpers AKBP

Polda Riau Anton, Kasirem Dandrem Wira Bima 031-WB Kolonerl Sipahutar dan tamu undangan lainnya.

Pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan MoU Himperra Riau bersama BRK Syariah dan Telkomsel, penyeraha plakat dari Himperra Riau kepada Gubernur Riau, foto bersama dan peninjauan stand yang ada pada Property Expo 2022.

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/681657/gubernur-riau-syamsuar-resmi-buka-property-expo-2022#>



03 / 11 / 2022

Sumber: goriau.com

---

## **Developer Diingatkan Bangun Rumah Layak, Bukan Bermasalah**

Penulis: Ratna Sari Dewi

**PEKANBARU** - Para developer yang bergabung dalam Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) diingatkan agar membangun rumah yang layak huni untuk masyarakat, bukan yang menimbulkan masalah.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna pada Property Expo 2022 di Atrium Kampar Mall SKA Pekanbaru, Riau, Rabu (02/11/2022).

Karena itu, Herry mengajak, seluruh anggota Himperra untuk menjaga kualitas perumahan yang dibangun sesuai dengan standar kriteria rumah layak huni.

"Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah. Yang jadi malah rumah yang tidak layak. Kasian masyarakat jika memberikan kualitas yang nggak sesuai dengan SPM-nya," ajaknya.

Pada kesempatan itu, Herry juga menghimbau seluruh pihak untuk dapat memperhatikan lebih khusus kelompok masyarakat informal.

"Masyarakat informal mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama, bagaimana rumah layak huni juga bisa didedikasikan bagi mereka. Ada fasilitas khusus dari BP2BT mungkin bulan ini terakhir, mari nanti didorong pemanfaatannya," himbau Herry.

Pihaknya juga berharap, dengan terselenggaranya expo menjadi momentum

yang tepat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai rumah layak huni, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah terhadap informasi harga, lokasi, dan persyaratan bantuan dan kemudahan pembiayaan rumah layak huni di Provinsi Riau.

"Sudah dua tahun event tidak kita lakukan. Tentunya pada hari ini dan beberapa hari kedepan diharapkan animo masyarakat tinggi untuk memeriahkan Property Expo," ujarnya.

Momen expo, tambahnya, juga bisa menjadi kesempatan pertemuan antara pengembang (Pejuang Rumah MBR) bertemu dengan pejuang kredit pemilikan rumah (KPR) dengan harapan bisa memberikan rumah layak huni kepada masyarakat berpenghasilan rendah khususnya di Provinsi Riau.

"Jika kita berbicara perumahan maka tantangannya itu selalu luar biasa. Karena, di nasional ada 12,27 juta yang belum punya rumah dan setiap tahunnya ada 680 ribu keluarga baru setiap tahunnya. Sementara fasilitas yang ada di pemerintah itu hanya sekitar 300 ribu setahunnya," ungkapnya.

Sehingga, lanjut Herry tantangan terkait pembangunan perumahan di Indonesia ini memerlukan kolaborasi, inovasi bersama untuk memenuhi amanat UU dalam memberikan rumah yang layak bagi semua masyarakat dapat terpenuhi dalam waktu yang terjangkau.



## **KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

---

03 / 11 / 2022

| Sumber: goriau.com

---

"Produk yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya rumah baru, tetapi juga rumah swadaya yang dibangun oleh masyarakat maupun renovasi," lanjut Herry.

Selain itu, pihaknya juga menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki beberapa program subsidi. Pertama adalah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ada sebanyak 200 ribu

unit yang dikembangkan menjadi 220 ribu unit. Kemudian, juga ada subsidi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang tidak berpenghasilan tetap ada juga Tabungan Perumahan Rakyat (Taperra).

<https://www.goriau.com/berita/baca/development-diingatkan-bangun-rumah-layak-bukan-bermasalah.html>



03 / 11 / 2022

Sumber: cnbcindonesia.com

---

## **Pendanaan Jadi Masalah Utama Pemenuhan Penyediaan Air Bersih**

Author: Eqqi Syahputra

**Jakarta, CNBC Indonesia** - Penyediaan air bersih yang layak untuk diminum masyarakat menjadi salah satu perhatian utama yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Sebab, ketersediaan air bersih tidak banyak atau terbatas. Sehingga perlu adanya sebuah kerja sama yang kuat antara pemerintah maupun swasta.

Hal tersebut diakui oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Kementerian PUPT Meike Kencanawulan Martawidjaja. Menurutnya salah satu masalah utama pemerintah dalam penyediaan air minum yang layak kepada masyarakat adalah pendanaan untuk mengembangkan infrastruktur air.

"Kebutuhan pendanaan untuk sektor air minum. Tidak bisa hanya pemerintah, tapi juga sumber lainnya. Dari perencanaan semula 63% dari APBN itu ternyata realisasinya lebih kecil lagi. Sehingga diharapkan ada pembiayaan lain yang lebih besar," jelas Meike dalam webinar "SPAM Terintegrasi Hulu-Hilir (Source to Tap) untuk Mencapai Target 10 Juta Sambungan Rumah", Kamis (3/11/2022).

Kendati demikian ia menyebut perkembangan pembiayaan saat ini sudah lebih baik. Karena banyak skema yang bisa dilakukan pemerintah dalam mendorong program-program percepatan infrastruktur, di antaranya ada kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau (KPBU), kemudian ada juga business to business, terutama BUMD baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan badan usaha.

Pola pemilihan ini terus berkembang sesuai dengan kebutuhan terutama untuk memenuhi *gap* pembiayaan yang diperlukan demi pembangunan.

"Bisa juga dengan perbankan baik pinjaman pemerintah daerah maupun BUMD. Kalau *advance* lagi bisa gunakan obligasi, kemudian bisa memanfaatkan CSR," jelasnya.

Seperti diketahui, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintah menargetkan pencapaian 100% akses air minum layak dan 15% akses air minum aman, serta 30% akses air minum perpipaan melalui pembangunan air minum 10 Juta Sambungan Rumah (SR).

Pencapaian target akses air minum layak juga akan mendukung pencapaian tujuan-6 Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, yakni akses universal air minum yang harus memenuhi kriteria sebagai air minum aman, dari sumber air yang layak, dapat diakses setiap saat dibutuhkan, dan kualitasnya memenuhi standar kesehatan untuk semua masyarakat.

Dalam memenuhi target *major project* penyediaan air minum 2024, pendanaan melalui APBN diperkirakan hanya mampu berkontribusi sebesar 17% dari total kebutuhan pendanaan sebesar Rp123,4 triliun, sehingga akses air minum hanya mampu dipenuhi sebanyak 3,1 juta sambungan rumah sampai akhir 2024.



## **KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

---

03 / 11 / 2022



Sumber: cnbcindonesia.com

---

Untuk itu, jika hanya mengandalkan APBN semata, maka belum cukup untuk mencapai target penyediaan air minum 10 juta SR.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/2021103181137-4-384997/pendanaan-jadi-masalah-utama-pemenuhan-penyediaan-air-bersih>



03 / 11 / 2022

| Sumber: cnbcindonesia.com

---

## Integrasi Hulu Hilir Jadi Syarat Mutlak Bangun Akses Air

Author: Khoirul Anam & Eqqi Syahputra

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama PT Moya Indonesia Irwan Atmadja Dinata mengungkapkan penyediaan air bersih menjadi tanggung semua stakeholder, terutama untuk perawatan air baku. Penyaluran air dari hulu ke hilir menurutnya pun masih menjadi pekerjaan rumah, dan diperlukan sinkronisasi aturan.

"Jadi di mana kita bisa bekerja lebih terbuka dan lebih cepat perizinan juga bisa dibantu PUPR," ujar Irwan dalam webinar "SPAM Terintegrasi Hulu-Hilir Untuk Mencapai Target 10 Juta Sambungan Rumah" pada Kamis (3/11/2022).

Dia juga mengingatkan sistem yang dibangun pun harus terintegrasi dan tidak terpecah dengan rumit. Menurut Irwan, investasi SPAM akan sulit dan tidak menarik jika sistemnya rumit.

"Jadi SPAM ini banyak sekali kepentingan masyarakat yang harus dilibatkan itu sektor yang harus kita bantu karena hak semua manusia mendapatkan air bersih air minum. Jadi kalau secara menyeluruh jangan melihat financial saja, namun juga *social impact*," jelasnya.

Selain investasi, menjaga sumber air baku juga menjadi tugas penting selanjutnya. Jika nantinya sumber air berkurang, maka harus ada berbagai upaya solutif agar tidak terjadi kelangkaan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Danareksa Arisudono Soerono mengatakan pendanaan dan investasi harus diperhatikan dalam penyediaan air bersih ini. Dalam Indonesia Water Fund, Danareksa berperan menggalang dana dari investor dan menyalurkan dana kepada pengelola.

"Kami akan memilih proyek yang layak didanai dan melihat secara integrasi," kata dia.

Arisudono mengatakan Danareksa berkomitmen membantu pemerintah mencapai target 10 juta sambungan rumah di 2024. Tantangannya dalam pembangunan akses air bersih ini adalah sistem SPAM yang terfragmentasi sehingga adanya ketimpangan. Untuk itu, penting ada pembangunan terintegrasi dari hulu ke hilir atau *source to tap*.

"Kalau dibilang *loan* 70%, kita butuh *equity* Rp 70 triliun. Kami hadir di situ, bagaimana mengumpulkan investor, kemudian dikelola BUMN. Jadi bisa menutup *gap* pembiayaan tadi," ujar Arisudono.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221103181958-4-385000/integrasi-hulu-hilir-jadi-syarat-mutlak-bangun-akses-air>



03 / 11 / 2022

Sumber: cnbcindonesia.com

---

## Sederet Inovasi Ini Diperlukan Genjot Akses Air Bersih di RI

Author: Khoirul Anam & Eqqi Syahputra

**Jakarta, CNBC Indonesia** - Pemerintah sedang berupaya meningkatkan akses air bersih dengan investasi pembiayaan campuran (*blended financing*) sehingga bisa membangun akses dari sumber (*source*) sampai ke konsumen (*to tap*). Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Trisaputra Zuna mengatakan *source to tap* secara konsep telah dilakukan perencanaan dan pelaksanaannya.

"Misalnya yang dalam satu kesatuan bisnis model seperti SPAM Juanda. Itu simulasi dari mengambil air, memproses, sampai dengan kontrak berbasis angsuran dan kinerja. Jadi yang biasanya di hulu *take or pay*, ini disediakan *take and pay*," kata Herry dalam webinar "SPAM Terintegrasi Hulu-Hilir Untuk Mencapai Target 10 Juta Sambungan Rumah", Kamis (3/11/2022).

Dengan begitu, PDAM hanya membayar air yang diterima, sehingga lebih berkeadilan dan efisien, dan memberikan solusi kepada pemerintah daerah. Untuk menggaet pihak swasta pun dilakukan sosialisasi dan pendampingan di setiap daerah.

"Tata cara masuknya untuk badan usaha, dalam KPBU ada dua cara pertama solutif, artinya pemerintah dan pemda, menyiapkan studi kelayakan, dan kami lakukan pelelangan dengan semua badan usaha bisa ikut," ujarnya.

Pemenangnya akan bekerja sama dengan PDAM. Badan usaha juga bisa melakukan

pengajuan proposal yang kemudian akan dilakukan pelelangan.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan 10 juta sambungan rumah untuk penyediaan air bersih dengan kebutuhan investasi mencapai Rp 123 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Jasa Tirta I Raymond Valiant Ruritan mengatakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menyediakan air bersih di tengah masyarakat dibutuhkan kreativitas dalam pendanaan. Penyediaan air bersih berangkat dari infrastruktur pengambilan air baku, kemudian turun ke instalasi, ke sistem perpipaan, dan distribusi ke masyarakat.

"Jadi rantai pasok panjang. Investasi masuk dari mana saja dengan cara yang kreatif dan inovatif," ujar Raymond.

Kemudian, efisiensi dan efektivitas. Artinya PDAM atau perusahaan daerah yang menyalurkan air perlu menekan kehilangan air dan mengurangi masalah teknis.

Dia menyebutkan perubahan iklim juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan air baku dan infrastrukturnya.

"Sebanyak 60% penduduk Indonesia ada di Jawa kompetisi pemakaian air luar biasa. Kita berhadapan dengan tantangan lebih besar untuk menyediakan air baku dengan jumlah dan kualitas yang baik," kata dia.





**KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN**

---

03 / 11 / 2022

|

Sumber: cnbcindonesia.com

---

<https://www.cnbcindonesia.com/news/2021103172923-4-384981/sederet-inovasi-ini-diperlukan-genjot-akses-air-bersih-di-ri>



03 / 11 / 2022

|

Sumber: cnbcindonesia.com

---

## **Akses Air Bersih Belum 100%, Ternyata Ini Kendalanya**

Author: Khoirul Anam

**Jakarta, CNBC Indonesia** - Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah mengungkapkan akses air bersih di wilayahnya juga menjadi salah satu fokus utama karena masih belum mencapai 100%. Di Tangerang menurutnya masih ada yang mengandalkan air tanah dan membeli air secara curah.

"Kalau jumlah layanan 455 ribu kepala keluarga. Sekarang baru terlayani baru 34%. Ini akan kami kejar melalui program Kementerian PUPR, hingga pembiayaan," kata Arief dalam Webinar SPAM Terintegrasi Hulu-Hilir Untuk Mencapai Target 10 Juta Sambungan Rumah, Kamis (3/11/2022).

Dia mengatakan pemerintah akan melakukan integrasi sehingga bisa memperluas akses air bersih, dengan memanfaatkan Cisadane dan menarik perhatian investor. Langkah ini menurutnya penting dilakukan karena wilayah utara Tangerang sudah mulai payau.

"Makanya dengan dukungan terobosan pembiayaan mudah-mudahan masyarakat

bisa terpenuhi kebutuhan air minum layak," kata dia.

Salah satu kendala utama dalam perluasan akses air bersih menurutnya adalah pembiayaan. Pasalnya, wilayah dengan penduduk hampir 2 juta ini membutuhkan lebih banyak jaringan utilitas mulai dari sumber hingga sambungan rumah.

Meski demikian dia optimistis bisa menarik investor karena adanya kepastian untung tanpa membebani masyarakat. Pasalnya, air sebagai kebutuhan utama dan memiliki demand yang tinggi.

"Jadi jaringan pipa di zona satu, itu semua menggunakan HDPE. Jadi lebih layak, lebih sehat, dan itu nilai tambah, daripada masyarakat beli air kemasan. Jadi efisiensi akan luar biasa. Ini akan edukasi ke masyarakat agar beralih dari air tanah menjadi menggunakan air minum yang dikelola pemerintah," jelas Arief.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221103152638-4-384934/akses-air-bersih-belum-100-ternyata-ini-kendalanya>



04 / 11 / 2022

Sumber: solopos.com

---

## **Kementerian PUPR Revisi Aturan Harga Rumah Subsidi**

Penulis: Afiffah Rahmah Nurdifa

Editor: Ahmad Mufid Aryono

Solopos.com, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merevisi Peraturan Menteri PUPR terkait penyesuaian harga rumah subsidi.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan untuk menyesuaikan harga rumah subsidi, pihaknya terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan untuk mengatasi kenaikan bahan konstruksi.

“Dirjen Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan sedang menyusun revisi Peraturan Menteri PUPR untuk mendukung dan menyesuaikan harga rumah subsidi yang belum disesuaikan dengan berbagai kenaikan harga konstruksi,” kata Iwan, Kamis (3/11/2022).

Sebelumnya, pengembang rumah subsidi terus mendorong pemerintah untuk segera menyesuaikan harga terhadap kenaikan harga bahan material. Apalagi, harga rumah subsidi masih belum diubah hampir 3 tahun.

Adapun, peraturan batasan harga rumah subsidi tercantum dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/2020 tentang batasan harga jual rumah sejahtera tapak yang diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi.

Beleid tersebut merupakan ubahan dari Kepmen PUPR No.535/KPTS/M/2019 yang diteken oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 18 Juni 2019.

Meski demikian, di beleid terbaru itu batasan harga rumah subsidi tidak mengalami perubahan.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengaku telah mengajukan anggaran untuk penyesuaian harga rumah subsidi dengan kenaikan sebesar 7%.

Namun, usulan tersebut masih tertahan di Kementerian Keuangan yang disebut harus ikut menghitung ulang dampak setelah kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi.

“Kita sudah siapkan anggarannya, tapi kebijakannya sendiri belum ada, jadi itu juga termasuk yang harus kita bicarakan di level kabinet,” kata Endra beberapa waktu lalu.

Menurut Sekjen DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali kenaikan 7% semestinya tidak memberatkan konsumen, mengingat pendapatan UMR sudah meningkat sejak 3 tahun lalu.

“Makanya kenapa Apersi usul sekitar 7% itu kurang lebih sama dengan UMR selama 3 tahun,” tegasnya.

<https://www.solopos.com/kementerian-pupr-revisi-aturan-harga-rumah-subsidi-1463468>



**KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN**

---

04 / 11 / 2022

|

Sumber: [solopos.com](https://solopos.com)

---